

**PENEGAKAN HUKUM
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
PADA SENGKETA INFORMASI
ANTARA LGMI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Nama : Yusril Faiz Octavianto

NIM : 17.02.51.2015

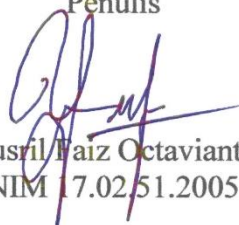
**FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
TAHUN 2022**

HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN
KESIAPAN UJIAN SKRIPSI



Saya, **YUSRIL FAIZ OCTAVIANTO**, dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 PADA SENGKETA INFORMASI ANTARA LGMI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK** adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya atas nama saya atau pihak lain.

Penulis


(Yusril Faiz Octavianto)
NIM 17.02.51.2005

Disetujui oleh Pembimbing
Kami setuju skripsi tersebut diajukan untuk ujian skripsi.

Semarang, 9 Februari 2022


(Dr. Dra. Dyah Listyorini, S.H, M.H, M.M)
NIDN 0020076001

HALAMAN PENGESAH

Tugas Akhir Berjudul PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR
14 TAHUN 2008 PADA SENGKETA INFORMASI ANTARA LGMI DAN
INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK

Ditulis oleh:

Nama : Yusril Faiz Octavianto
NIM : 17.02.51.2015

Telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Tugas Akhir dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Jenjang Strata I Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Semarang, 9 Februari 2022

Ketua

Dr. Dra. Dyah Listyorini, S.H, M.H, M.M
NIDN 0020076001

Sekretaris

Dr. Saik Faozi, S.H., M.Hum
NIDN: 0625096501

Anggota

Dr. Rochmani, S.H., M.Hum
NIDN : 0618126401

Mengetahui,

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Fakultas Hukum dan Bahasa



STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dekan

FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA

Dr. Agnes Widyaningrum, S.E., S.Pd., M.Pd.
NIDN: 0604017201

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

Kejar impianmu, berikan yang terbaik untuk negara tercinta ini
“Purwanto”

Sehebat apapun kamu, jangan lupakan TuhanMu
“Noor Faizah Tud Daroini”

Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang
Imam Syafi'i

Setiap kamu bertemu orang baru, jangan lupa selalu kosongkan gelasmu
Bob Sadino

Kegagalan menghancurkan pecundang. Kegagalan menginspirasi pemenang
Robert Kiyosaki

Jika anda ingin bersinar layaknya matahari, maka terlebih dahulu harus terbakar.
Adolf Hitler

Terkadang perlu kesepian untuk membuktikan bahwa Anda benar
Vladimir Putin

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orangtua
2. Orang-orang tersayang
3. Almamaterku

**PENEGAKAN HUKUM
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 PADA SENKETA INFORMASI
ANTARA LGMI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK**

YUSRIL FAIZ OCTAVIANTO, DYAH LISTYARINI

Fakultas Hukum, Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
Email: yusrilfaizo@gmail.com, dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini tentang penegakan hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam sengketa informasi antara LSM LGMI dengan Inspektorat Kabupaten Demak. Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum empiris atau penelitian hukum non-doktrinal. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif analitis, yaitu menggambarkan analisis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan. Sumber data dalam penelitian empiris merupakan data yang berasal langsung dari sumber di lapangan. Sumber data dalam penelitian empiris merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif. Sifat preskriptif dalam penelitian empiris ini artinya dimaksudkan untuk memberikan argumentasi terkait hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kantor KIP Provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan melalui proses mediasi dan melalui proses Ajudikasi non-litigasi. Dalam sengketa informasi publik antara LSM LGMI dengan Inspektorat Kab. Demak dilakukan peneakan hukum dengan ajudikasi non-litigasi dengan adanya Putusan Nomor 004/PTS-A/III/2019. Pada amar Putusan tersebut menyatakan bahwa Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki Legal Standing atau kedudukan hukum dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi mengenai salinan hasil audit atau tindak lanjut laporan dugaan tindak pidana pungutan liar di SMP Negeri 1 Wonosalam Kab. Demak dan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak dapat diterima. Sanksi yang dapat dikenakan berkaitan dengan Keterbukaan Infomasi Publik adalah adanya sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 51 sampai denggan 57 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan adanya sanksi administratif kepada Badan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang keterbukaan informasi Publik.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Sengketa Informasi, LSM LGMI dan Inspektorat

ABSTRACT

This study analyzes the law enforcement of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure in the information dispute between the LGMI NGO and the Demak Regency Inspectorate. The type of research used in writing this thesis is the type of empirical legal research or non-doctrinal legal research. This study uses a descriptive analytical research specification, which describes the analysis because the results of this study only describe or illustrate. The source of data in empirical research is data that comes directly from sources in the field. The data sources in empirical research are primary data sources and secondary data sources. The method used in this research is the interview method to the parties directly related to the problem being studied. Analysis of the data used in this study using in this study is prescriptive. The prescriptive nature of this empirical research means that it is intended to provide arguments regarding the results of research that has been carried out. The results of this study indicate that law enforcement of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure at the KIP Office of Central Java Province can be carried out through a mediation process and through a non-litigation adjudication process. In a public information dispute between the NGO LGMI and the Kab. Demak was enforced by law with non-litigation adjudication in the presence of Decision Number 004/PTS-A/III/2019. In the decision, the decision states that the Petitioner does not have Legal Standing or legal standing in the application for dispute resolution of information regarding a copy of the audit result or a follow-up to the report on the alleged crime of illegal levies at SMP Negeri 1 Wonosalam Kab. Demak and requests for information dispute resolution cannot be accepted. Sanctions that can be imposed in relation to Public Information Disclosure are criminal sanctions as regulated in Articles 51 to 57 of Law Number 14 of 2008 and administrative sanctions to Public Bodies as regulated in Article 46 Paragraph (1) and Paragraph (2) Law of the Public Information Disclosure.

Keywords: Law Enforcement, Information Dispute, LGMI and Inspectoratory

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas Berkat dan RahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 PADA SENGKETA INFORMASI ANTARA LGMI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) Ilmu Hukum di Universitas Stikubank Semarang. Dalam proses penulisan skripsi ini penulis memperoleh petunjuk, bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karenanya penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Allah SWT
2. Keluarga
3. Bapak Dr. Edy Winarto, S.T., M.Eng selaku Rektor Universitas Stikubank Semarang.
4. Ibu Dr. Agnes Widyaningrum, S.E., S.Pd., M.Pd selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang.
5. Dosen Pembimbing yakni Ibu Dr. Dra. Dyah Listyarini, S.H, M.H, M.M
6. Para Dosen Fakultas Hukum Stikubank
7. Teman-teman serta para pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pihak siapapun yang membaca skripsi ini.

Semarang, 9 Februari 2022

Penulis

YUSRIL FAIZ OCTAVIANTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAH.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kerangka Pemikiran.....	9
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. TINJAUAN UMUM	16

1. Pengertian umum tentang penegakan hukum.....	16
2. Pengertian umum tentang informasi publik	17
3. Pengertian umum tentang komisi informasi.....	20
4. Pengertian umum tentang keterbukaan informasi publik.....	23
B. PENGERTIAN KHUSUS.....	25
1. Pengertian khusus sengketa informasi.....	25
2. Pengertian khusus Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Garuda Muda Indonesia (LGMI).....	27
3. Pengertian Khusus tentang Inspektorat Kabupaten Demak	29
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN	31
A. Tipe Penelitian	31
B. Spesifikasi Penelitian	32
C. Sumber Data.....	32
D. Metode Penumpulan Data	33
E. Metode Penyajian Data	34
F. Metode Analisis Data.....	34
BAB IV	36
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	36
A. Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pada Sengketa Informasi Publik Antara LGMI dan Inspektorat Kabupaten Demak	36
1. Penyelesaian Sengketa di KIP Provinsi Jawa Tengah.....	36
2. Kronologi Kasus Sengketa Informasi Antara LGMI dan Direktorat Kabupaten Demak.....	50

3. Pertimbangan KIP Provinsi Jawa Tengah Dalam Penegakan Hukum Sengketa Informasi	54
B. Sanksi Pada Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pada Sengketa Informasi Publik.....	61
BAB V.....	66
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	72